



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 25 September 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan POLRI (POLRES Kepulauan Selayar), tempat kediaman di Jalan Usman Dg. Muntu, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gleno, 03 November 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan POLWAN (POLRES Kepulauan Selayar), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di S. Siswomiharjo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA Sly tanggal 16 Januari 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 dan perkawinan tersebut tercatat

Hal. 1 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0095/001/II/2018, tanggal 02 Februari 2018;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih dua tahun lamanya dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Usman Dg. Muntu, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:

- a. Termohon memiliki sifat temperamental;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal 28 April 2018. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah kontrakan lain di Jalan S. Siswomiharjo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa selaku Anggota POLRI, pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar tanggal 06 Januari 2020 (*quo vide* surat izin perceraian terlampir).

Hal. 2 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA.Sly pada tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 23 Januari 2020, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI POLRES Kepulauan Selayartelah menyerahkan sebagai lampiran Permohonan Izin Cerai atas nama

Hal. 3 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU Muhammad Aksan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor (POLRES) Kepulauan Selayar tanggal 6 Januari 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0095/001/II/2018, tanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 11 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI POLRES Selayar, bertempat kediaman di Jalan Topaleo, Kelurahan Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja dengan Pemohon sebagai anggota POLRI POLRES Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon juga sebagai teman kerja di POLRES Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bdenteng Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sipat temperamental dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal. 4 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat bekas cakaran dipunggung Pemohon akibat perlakuan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon terkadang hanya karena persoalan sepele seperti Pemohon lambat membuka pintu rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pimpinan bahkan dihadiri oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Kayuadi, 3 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI POLRES Selayar, bertempat kediaman di Jalan Jl. S. Parman Kelurahan Benteng selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja dengan Pemohon sebagai anggota POLRI POLRES Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon juga sebagai teman kerja di POLRES Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bdenteng Selayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Hal. 5 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sipat temperamental dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat lebam dan bekas cakaran dipunggung Pemohon akibat perlakuan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon terkadang hanya karena persoalan sepele seperti Pemohon lambat membuka pintu rumah ketika Termohon pulang kerja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 208;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pimpinan bahkan dihadiri oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PA Sly tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 23 Januari 2020 namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula

Hal. 6 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun namun belum dikaruniai anak, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon memiliki sifat temperamental dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Kemudian pada tanggal 28 April 2018, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir memberikan jawaban, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai anggota POLRI POLRES Kepulauan Selayar telah menyerahkan lampiran Permohonan Izin Cerai atas nama BRIPTU Muhammad Aksan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor (POLRES) Kepulauan Selayar tanggal 6 Januari 2020

Hal. 7 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0095/001/II/2018, tanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon mempunyai sifat temperamental dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, kedua saksi Pemohon pernah melihat bekas dipungggung Pemohon lebab dan bekas cakaran akibat kekerasan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2018 sampai sekarang atau sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih serta keduanya sudah tidak saling komunikasi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon

Hal. 8 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat Temperamental sehingga punggung Pemohon pernah lebam dan terdapat bekas cakar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang bulan Januari 2020 atau sekitar 1(satu) 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa terbukti sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah

Hal. 9 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له من دعى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc dan Mawir, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jalaluddin, S. Ag, M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc

Abdul Rahman, S. Ag., M.H.

Mawir, S.Hi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S. Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.11/Pdt.G/2020/PA.Sly